**Perjuangan Politik Perempuan**

**di Masa Pendudukan Jepang**

**Ahmad Kosasih**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas IPPS, Universitas Indraprasta PGRI

[aseng.kosasih@gmail.com](mailto:aseng.kosasih@gmail.com) / [orcid.org/0000-0001-6161-4549](https://orcid.org/0000-0001-6161-4549?lang=en" \t "_blank)

***Abstract*** *- Women in social, political, cultural and security perspectives tend to be placed as those who help men. In the structure of the Japanese military occupation, the position and role of women as well as their husbands' companions, they are also no more easily controlled parties in their various activities, especially political activities. Women's political struggles during the Japanese occupation were more of a form of daily activities to support various military government policies. As a result of this, their strategic role in propaganda programs such as 3A or the like is illustrated in a descriptive range of news coverage, which tends to be ceremonial.*

***Abstrak*** *– Perempuan dalam pandangan sosial, politik, budaya dan keamanan cenderung ditempatkan sebagai pihak yang membantu kaum laki-laki. Dalam struktur kekuasaan pendudukan militer Jepang, kedudukan dan peran perempuan selain sebagai pendamping suami, mereka juga tak lebih sebagai pihak yang mudah dikontrol dalam berbagai aktivitasnya, terlebih aktivitas politik. Perjuangan politik perempuan selama pendudukan Jepang lebih kepada bentuk aktivitas keseharian guna mendukung berbagai kebijakan pemerintah militer. Akibat inilah, peran strategis mereka dalam program-program propaganda seperti 3A atau sejenisnya terlukiskan dalam deskritif liputan berbagai berita, yang cenderung seremonial.*

**Pendahuluan**

Pada paruh kedua 1920-an, organisasi pergerakan yang besar seperti Sarikat Islam, PNI dan PKI membentuk seksi-seksi perempuan dalam struktur organisasinya. Lewat sayap organisasi yang melibatkan wakil perempuan, kaum wanita mulai meletakkan dasar-dasar perjuangan politik mereka dalam area publik yang lebih terbuka. Aktivitas tersebut menyerap lebih banyak lagi perempuan dari kalangan yang lebih luas di masyarakat. Meski demikian, pembentukan seksi perempuan yang terpisah dari partai-partai politik cenderung membatasi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan mengikat perempuaan agar pusat perhatiannya hanya pada persoalan-persoalan yang dianggap sesuai dengan mereka.

Organisasi perempuan menjadi lebih bersifat politis Perjuangan persamaan hak perempuan misalnya, di tahun-tahun terakhir kekuasaan Belanda orientasi emansipasi sudah lebih mengarah pada bentuk perjuangan menuntut hak perwakilan kaum wanita di Parlemen (Dewan Rakyat = *Volksraad*). Bentuk desakan untuk menempatkan wakil wanita di parlemen menjadi salah satu kunci pengakuan mereka di bidang politik.

Bentuk partisipatif tersebut mengalami penuruan sampai masa kedatangan dan pendudukan Jepang beralngsung. Pergerakan organisasi politik perempuan sebagian besar dibekukan. Kaum perempuan menyadari bahwa untuk menghidupkan organisasi-organisasi sosial-politik yang pernah ada, mereka mendapat tantangan, bahkan cenderung dilumpuhkan dengan pengawasan Jepang yang amat ketat. Hal itu berbeda dengan situasi sebelum kedatangan Jepang ke Hindia Belanda.

Dengan pengaruh kekuasaan militer Jepang berdiri, langkah perjuangan kaum perempuan dapat dikatakan mengalami penurunan dalam arti kualitas perjuangan, meski tidak berarti secara kuantitas juga mengalami penurunan. Keadaan ini, terutama terjadi di masa-masa awal pendudukan. Organisasi-organisasi wanita yang lahir sejak masa akhir Hindia Belanda dan telah menjadi arena aktivitas pergerakan kaum perempuan dalam menuntut kesamaan di bidang politik dan sosial. Di bawah kendali militer Jepang, organisasi-organisasi yang muncul lebih banyak sebagai alat perpanjangantangan kepentingan penguasa militer dalam menjalankan program-program propagandanya. Sehingga, aktivitas mereka pun terbatas pada kegiatan pendukung yang membantu pemerintah dalam merebut hati rakyat dan bangsa Indonesia dalam menyokong ekspansi Jepang di Asia.

Sifat kekuasaan Jepang yang mulai menampakkan sebagai penguasa militer, yang meletakkan dominasi kaum laki-laki di arena peperangan dan pertempuran. Situasi ini makin memojokkan peran perempuan kepada hal-hal yang bersifat domestik. Pengaruh militeristik mejadikan kaum istri sebagai pendamping suami, yang harus membantu peran suami sesuai posisi dan kedudukannya di tengah masyarakat. Atau dengan katan lain, mereka tidak lebih sebagai pendukung dari jabatan suami sebagai kepala rumah tangga.

Dalam perspektif teori perempuan, kedudukan sub-ordinasi seperti itu memposisikan peran wanita selain sebagai ibu, mereka juga sebagai istri yang harus tunduk kepada kedudukan suami. Contoh perspektif seperti itu, kiranya dapat dilihat pada pengistilahan atau pendefinisian ”Dharma Wanita” yang berakar pada pemikiran militer di zaman sekarang (Suryakusuma, 1991: 73). Selanjutnya tentang konsep “Dharma Wanita” pembahasan lebih dalam diulas dalam karyanya “State Ibuisme: The Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order” *Thesis MA*, (Suryakusuma, 1987: 3)

Untuk selanjutnya dalam melihat perjalanan organisasi wanita selama pemerintahan militer Jepang, terutama mengenai berbagai kegiatan ataupun aktivitas mereka, dan tentang jalan pikiran yang memungkinkan kaum perempuan dapat mengekpresikan perannya. Tidak saja terbatas pada bentuk aktivitas organisasi perempuan yang sengaja dibentuk guna membantu program pemerintah, akan tetapi aktivitas keseharian kaum wanita pun dapat pula di pahami lewat berbagai bentuk kegiatan yang mendapat perhatian luas di masyarakat.

**Pembahasan**

**Aktivitas Perempuan di Awal Pendudukan Jepang**

Seiring dengan dijalankannya propaganda “3A” yang bertujuan mencari simpatik rakyat Indonesia, maka dibentuk pula himpunan yang dikenal dengan “Barisan Istri 3 A” yaitu wadah bagi para istri yang kebetulan para suami mereka menjadi orang-orang yang terlibat dengan kegiatan tiga A. Disusul kemudian dengan dibentuknya “Barisan Putri Asia Raya” sebagai bagian dari pelaksanaan propaganda tersebut, khususnya bagi kaum puteri.

Selanjutnya pada saat pembentukan *Poetra* (Pembela Tanah Air) di dalamnya dibentuk Barisan Pekerja Perempuan Poetra, organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan para pekerja wanita dan memberi bantuan pendidikan mengenai dasar-dasar bekerja bagi sesamanya. Kegiatan organisasi ini selain memberikan pendidikan dan latihan kepada remaja putri, seperti memberikan kursus menjahit, memasak dan keterampilan lain yang bisa dikerjakan kaum perempuan.

Di Jakarta atau tepatnya di jalan *Reijseijk* 18 di dirikan sebuah lembaga keputrian yang menjadi pusat pendidikan kaum perempuan di bawah pengawasan pemerintah Jepang dan sempat menjadi sorotan surat kabar Asia Raya tanggal 13 dan 14 Januari 2003 (Asia Raya, 13 dan 14 Januari 2603/1943 tahun ke-II hal.3). Dalam berita lain (Asia Raya, Senin, 18 Januari 2003) diberitakan tentang isi pidato yang disampaikan oleh Kolonel Nakayama, seorang pejabat militer Jepang, bahwa perlunya pendidikan semangat baru pada anak-anak yang harus diperdalam dan dapat dilakukan oleh guru-guru yang telah mendapatkan pendidikan secukupnya. Sebagai langkah nyata dari isi pidato tersebut, pemerintah bekerjasama dengan lembaga keputrian pada hari itu mengadakan pembukaan Kursus Latihan Guru. Pelaksanaan kursus itu diikuti peserta kaum putri yang telah mendapat pendidikan cukup sebelumnya dan bertujuan agar dapat memberikan pengajaran selanjutnya kepada kaum perempuan muda lain yang belum men-dapatkan pendidikan (Asia Raya, Senin, 18 Januari 2603 (1943) tahun ke-II hal.3).

Pengawasan yang ketat oleh pemerintah militer yang tidak hanya dirasakan pada aktivitas organisasi wanita saja, tetapi secara umum diberlakukan kepada organisasi-organisasi lain yang ada pasa saat itu. Harry J. Benda dalam bukunya *Bulan Sabit dan Matahari Terbit , Islam Indonesia pada masa Pendudukan Jepang* terjemahan Daniel Dakidae (Kosasih, 2003) menyebutkan bahwa kontrol pemerintah militer terhadap organisasi pemuda yang berhaluan Islam dengan melalui pelaksanaan program pendidikan sampai pada tingkat pedesaan, terutama dengan melihat posisi kunci kaum ulama “kiayi” dalam masyarakat Indonesia (Harry J Benda, 1980 : 43).

Kebijakan monitoring umumnya dilakukan dengan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi dalam setiap organisasi yang pernah terbentuk. Sebagai contoh misalnya, atas izin pemerintah dan karena dianggap sebagai bagian dari upaya propaganda Jepang dalam mendekati kaum muda Indonesia. Pemberitaan mengenai kegiatan yang dilakukan Barisan Pemuda Asia Raya bagian keputrian, cabang organisasi ke-27 yang berada di Djatinegara. Dalam berita itu disebutkan bahwa seksi organisasi ini akan mengadakan kursus-kursus keterampilan bagi kaum perempuan muda. Macam-macam kursus yang adakan seperti: kursus pengetahuan umum, kursus pemberantasan buta huruf, pekerjaan tangan dan masak memasak. Kegiatan ini dipelopori di antaranya oleh Siti Mariah dan Umi Kalsoem (Asia Raya, Selasa, 19 Januari 2603 (1943) tahun ke-II hal.2).

Sebuah berita yang berjudul artikel “*Kaoem Ibu Indonesia* *Bergerak”*. Dari artikel ini dimuat pandangan untuk meluaskan ide-ide propaganda, di mana rakyat Indonesia bersama bangsa-bangsa lain yang bergabung dalam persemakmuran Asia Raya di bawah pimpinan Jepang. Di beritakan pula tentang berkumpulnya para ibu-ibu istri pejabat di rumah Nona Lasmidjah Hardi yang juga aktif di Barisan Pemuda Asia Raya, dan pertemuan telah menggagas pembentukan *Komite Kaoem Ibu* untuk menolong korban kesengsaraan. Komite ini kemudian diresmikan pemerintah Jepang, dengan tujuan pendirian membantu mengatasi kemiskinan dan menurunnya kesejahteraan rakyat. Mereka yang merasa mempunyai kemampuan dapat membantu suadaranya yang kekurangan dan itu dapa dilakukan dengan bekerjasama dengan komite ini (Asia Raya, Rebo, 27 Januari 2603 /1943 tahun ke-II hal.3).

Secara tidak langsung, bahwa interpensi pemerintah militer Jepang telah berhasil mengarahkan kegiatan organisasi-organisasi kewanitaan dan lembaga-lembaga keputerian lainnya, sesuai dengan kepentingan penguasa, yaitu menjadi lembaga yang aktiv menyuarakan kepentingan penguasa kepada masyarakat luas. Sebagai contoh misalnya, beberapa kegiatan kesenian yang melibatkan kerjasama *Fujinkai* dengan *Heiho* menjadi berita hangat pada hari itu yang mendapat sorotan dari berbagai media massa Jakarta. Diberitakan bahwa pertunjukkan yang diselenggarakan dikunjungi oleh beribu-ribu kaum wanita dan juga pembesar-pembesar Jakarta, baik pribumi maupun bangsa Jepang (Asia Raya tanggal 10 November 2603 (1943) tahun ke-II hal. 3).

Bentuk intervensi lain yang dapat dilihat pada pemberian ruang-ruang tertentu untuk diisi dengan informasi mengenai kegiatan kaum wanita. Koran Asia Raya sebagai salah satu lokomotif surat kabar penguasa memberikan satu pojok tersendiri bagi penulisan-penulisan mengenai dunia kewanitaan. Kolom pada surat kabar Asia Raya tersebut dikenal dengan rubrik “*Renungan Puteri*”. Beberapa penulis wanita yang aktif mengisi lembaran halaman *Renungan Putri* ini, seperti nama-nama Lasmidjah Hardi, yaitu seorang penulis tetap yang juga aktif di Lembaga Keputrian (Asia Raya, 13 Januari 2603 tahun ke-II hal.3); nama lainnya Ny. Soetiyah, yang salah satu tulisannya dimuat berjudul “Pengorbanan Barisan Belakang”, inti dari tulisan tersebut menginformasikan serta menganalisa singkat tentang pembukaan Sekolah Tinggi Militer khusus perempuan yang telah dibuka oleh pemerintah pendudukan Jepang di Thailand (Bankok). Menurutnya, pembukaan sekolah militer tinggi yang menerima kesempatan bagi kaum perempuan, tidak lain bertujuan untuk mendorong kaum perempuan agar dapat membantu prajurit Jepang melawan musuh-musuhnya. Pengorbanan bagi kaum perempuan (di Indonesia) yang berada di barisan belakang, adalah menjadi sangat penting dalam keadaan perang seperti ini. Dalam tulisan itu juga dijelaskan apa-apa yang dimaksud dengan bentuk dari pengorbanan-pengorbanan tersebut (Asia Raya, 9 Januari 2003 tahun ke-II hal. 3). Pembukaan sekolah militer untuk wanita di Muangthai – pada masa awal muridnya sejumlah 30 orang, di antaranya seorang putri Perdana Menteri Pibul Songgram, yang menerima pendidikan militer yang penuh sifat ke laki-lakian tersebut. (Djawa Baroe No.5 tahun 2603/1943 : 24)

Besarnya perhatian pemerintah Jepang terhadap peran aktif kaum perempuan yang turut memberikan sumbangsihnya terhadap pendidikan dan pengajaran, pada tanggal 14 boelan 1, Okazaki *Gunseikan* telah mengadakan kujungan perjalanan untuk menyelidiki sekolah-sekolah bersama-sama dengan Nakayama Samoe *Boetjo*, Hatakeda Naimoe *Boetjo* (Kepala Kantor Pangreh Praja). Dalam kunjungan ini termasuk ke Sekolah Kepandaian Poetri “Wakaba” yang dikepalai oleh Kepala Moeda Nona Azizah. ((Djawa Baroe No.3 tahun 2603/1943 : 9)

Adakalanya seorang penulis perempuan menyampaikan pesan-pesan tulisannya dengan menyamarkan nama jelasnya atau menggunakan nama-nama simbolik agar tidak mudah diketahui identitasnya, seperti salah contoh seorang penulis menggunakan nama samaranya sebagai Melati Merah yang menulis artikel berjudul“ Tahun Baru saat untuk membikin perhitungan” sebuah essay yang ditulis dalam (Asia Raya Djoem’at 1 Januari 2603 tahun ke-II hal. 2). Dalam tulisan ini diungkapkan tentang perlunya kaum wanita menyadari posisi yang harus dipikul dan menjadi pihak yang aktif membantu peperangan Jepang.

Penulis lain Ny. Barindi dalam salah satu tulisannya berjudul “Kaoem Perempoean Tani di Desa-Desa”, artikel yang mengisi pojok *Renungan Putri* mengulas tentang aktivitas dan peranan kaum perempuan yang terdapat di masyarakat bawah dari sebagian besar rakyat Indonesia. Jasa mereka yang cukup besar dalam hal persediaan bahan baku menjadi sangat penting. (Asia Raya, Sabtu, 30 Januari 2603 (1943) No.26 tahun ke-II hal. 3).

Penyampaian masalah-masalah wanita yang disuarakan dan ditujukan kepada pembaca wanita tersebut sebagian mendapat tanggapan dari orgasasi kaum wanita yang mereka terapkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan mereka di masyarakat (Kosasih, 2005). Meski pun demikian untuk merealisasikan hubungan penjabaran teoritis dan aplikasinya di masyarakat selalu mendapat kontrol ketat dari pihak pemerintah. Sehingga peran organisasi wanita sepanjang masa pendudukan Jeapng sejauh kemampuan mereka untuk memajukan dunia pengajaran dan pendidikan serta pemberdayaan kesejahtreraan social kaum perempuan dalam membantu jalannya pemerintahan militer Jepang.

**Organisasi Wanita “FUJINKAI”**

Penguasaan Jepang terhadap Indonesia disamping bertujuan untuk mengekploitasi sumberdaya alam yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung kekuatan angkatan perang mereka pada perang Asia Raya. Tentara Jepang pun melakukan ekpolitasi terhadap tenaga kerja dari rakyat Indonesia. Bahkan, selanjutnya penguasa militer Jepang pun menerapkan suatu kebijakan yang bertujuan memobilisasi tenaga-tenaga muda sebagai kekuatan pendukung mereka di tengah kancah peperangan.

Langkah penguasa Jepang untuk memobilisasi penduduk, khususnya dari kalangan muda secara khusus bertujuan mempergunakan para pemuda setempat sebagai tenaga pertahan dalam perang melawan sekutu, yaitu dengan cara mendidik kaum muda Indonesia di bidang militer.

Pada tanggal 29 April 1943, tepat pada hari ulang tahun Kaisar Jepang diumumkan secara resmi beridirinya dua organisasi kepemudaan yang diberi nama *Seinendan* dan *Kaibodan*. *Seinendan* adalah organisasi semi militer yang berasal dari pemuda. Tujuan pembentukan *Seinendan*  adalah mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya dengan kekuatan sendiri. Pembentukan badan kepemudaan itu oleh Jepang juga dimaksudkan untuk memperoleh tenaga cadangan untuk memperkuat angkatan perang Jepang melawan sekutu.

*Kaibodan*  adalah barisan bantuan polisi. Mereka adalah *Seinendan* yang termasuk dalam kelompok khusus, karena mendapat pendidikan untuk membantu tugas-tugas polisi. *Kaibodan* dibentuk di desa-desa. Di Sumatera dikenal dengan nama **Bogodan**  dan di Kalimantan disebut *Borneo Konan Hokokudan*.

Kedua organisasi ini langsung di bawah *Gunseikan*. Secara resmi tujuan Seinendan bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda, agar dapat menjaga dan mempertahankan tanahairnya dengan kekuatan sendiri. Meskipun sebenarnya maksud tersembunyi ditujukan untuk memperoleh tenaga cadangan dalam memperkuat usaha mencapai kemenangan akhir dalam perang Asia Raya. (Marwati Djoened Poesponegoro, et.al., 1984 : 30)

Hal penting yang menyangkut pembentukan Seinendan dan Kaibodan tersebut adalah badan-badan ini didirikan sebagai langkah pemerintah Jepang dalam melakukan pengerahan tenaga rakyat yang dilakukan di seluruh Indonesia sampai ke pelosok-pelosok.

Badan-badan kepemudaan lainnya yang mendapat persetujuan pemerintah Jepang untuk bergerak memobilisasi serta mengerahkan kekuatan rakyat Indonesia adalah *Heiho*, yaitu pembantu prajurit Jepangyang berasal dari pemuda Indonesia. Tujuan dibentuknya Heiho adalah agar dapat dimanfaatkan untuk mempertahankan negeri-negeri yang telah diduduki Jepang. Mereka pun ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang. Salin itu dibentuknya organisasi *Suisyintai* (Barisan Pelopor). Barisan Pelopor merupakan organisasi pemuda pertama yang dibimbing kaum nasionalis seperti Ir. Soekarno dan lain-lai. Dan berikutnya pembentukan PETA (Pembela Tanah Air), yaitu salah satu badan resmi militer yang anggota-anggotanya terdiri dari para pemuda Indonesia dan dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1944 dan banyak mendapat pendidikan militer dari penguasa Jepang.

Pengerahan dan mobilisasi penduduk tidak ditujukan kepada kaum laki-laki muda Indonesia, tapi juga di lakukan terhadap kaum wanita muda yaitu dengan dibentuknya himpunan wanita *Fujinkai*. Himpunan ini dibentuk pada bulan Agustus 1943. Perhimpunan yang di dalamnya bergabung para wanita-wanita muda, yang diharapkan berpotensi mendukung kegiatan secara lebih terorganisir,

Latar belakang dibentuknya Fujinaki sebagaimana dipahami bahwa dengan dibukannya kesempatan bagi kaum pribumi untuk mengisi jabatan-jabatan dalam struktur pemerintahan, banyak pemimpin-pemimpin nasionalis yang menjadi pejabat dan terikat dalam struktur pemerintahan Jepang. (*Kan-po* No. IV tahun 1943 (2603) : 115). Dari para istri pejabat inilah kemudian organisasi *Fujinkai* terbentuk. Pembentukan *Fujinkai* pada awalnya ditujukan sebagai salah satu organisasi para militer yang menghimpun para wanita muda, di mana anggotanya terdiri dari para wanita yang berumur minimum 15 tahun, dengan batas maksimum tidak ditentukan.

Sedangkan dalam pembentukan organisasi ini juga ditujukan membantu peran para suami yang notebenennya para pejabat dan pegawai pemerintah yang tunduk kepada keinginan penguasa militer. Sebagai catatan yang harus diingat bahwa latar belakang terbentuknya organisasi ini diawali dengan munculnya *Fujinkai* cabang Jakarta (*Tokubetshu Shi Fujinkai*). Baru setelah itu disusul dengan cabang-cabang lain di seluruh wilayah pendudukan Pembahasan mengenai sejarah Fujinkai Cabang Jakarta oleh Rita Lubis, menjadi topik penulisannya pada jurusan sejarah FSUI, sekripsi sarjana berjudul “Jakarta Tokubetshu Shi Fujinkai” (Rita Lubis : 1988).

Pada dasarnya pemerintah Jepang hanya mengizinkan satu organisasi perempuan *Fujinkai* yang dapat dibergerak dan berperan dalam masalah-masalah pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Sehingga untuk kepentingan itu pihak penguasa banyak melakukan pembinaan-pembinaan terhadap perkembangan organisasi tersebut. Dalam satu kesempatan kerjasama antara wanita Fujinkai dan para pemuda yang bergabung dalam Heiho pada sebuah acara kesenian Islam yang dipertunjukkan kegiatan-kegiatan kaum muda Islam bagian keputrian dengan bentuk-bentuk kegiatan yang ditujukan pada wanita muda. (Asia Raya, 18 Januari 2603).

Dukungan terhadap kegiatan *Fujinkai* langsung mendapat perhatian yang besar dari penguasa Jepang, seperti terlihat pada isi pidato yang disampaikan oleh Kolonel Nakayama tentang pendidikan semangat baru pada anak-anak yang harus diperdalam dan dapat dilakukan oleh guru-guru yang telah mendapatkan pendidikan secukupnya. Sebagai langkah nyata dari isi pidato itu pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Keputrian Fujinkai mengadakan pembukaan Kursus Latihan Guru. Yang menjadi pesertanya adalah kaum putrid yang telah mendapatkan pendidikan dasr pendidikan sebelumnya dan bertujuan agar dapat memberi pengajaan kepada kaum putrid lainnya yang belum mendapat pendidikan. (Asia Raya 16 Djanoeari 2604)

Atas izin dari pemerintah Jepang dan sebagai salah satu dari usaha mendekati kaum wanita. Organisasi seperti *Fujinkai* diharapkan memberikan solusi, yang tidak hanya pada pendidikan ala militer, akan tetapi juga memberikan pengajaran yang bersifat kewanitaan. Macam-macam kursus seperti : kursus pengetahuan umum, pemberantasan buta huruf, kursus pekerjan atau keterampilan tangan (menjahit; memasak) dan pendidika lainnya diberikan kepada kaum wanita muda selaku barisan pendukung yang berada di belakang kekuatan tentara Jepang.

Tak heran bila kemudian peran organisasi seperti Fujinkai sebagai satu-satunya organisasi pemerintah banyak mendapat pertentangan bahkan ditolak oleh kalangan wanita sendiri. Bagi kaum perempuan-perempuan militan, mereka dihadapkan pada keputusan apakah akan ikut bekerjasama dengan organisasi yang serba dibatasi tersebut atau tidak. Di sisi lain tuntutan kebebasan dan kemerdekaan kaum wanita pada persoalan-persoalan yang menyangkut social, budaya dan politik, akhirnya memaksa mereka untuk bekerjasama dan mendapatkan bahwa organisasi tersebut (Fujinkai) dianggap telah berhasil mengumpulkan perempan-perempuan muda dari latar belakng social yang beragam, dan dari sana dibentuklah suatu ikatan yang lebih luas.

Lain halnya dengan mereka, yang tetap memilih tidak bekerjasama dan mepertaruhkan hidup mereka dengan bergabung dalam organisasi-organisasi sosial politik bawah tanah, yaitu tokoh-tokoh perempuan yang memperjuangkan dan melakukan aktivitas kegiatannya di luar ketentuan bahkan lepas dari pengawasan penguasa Jepang. Mereka yang dengan sadar bergabung dengan kaum muda yang dikenal sebagai Pemuda Menteng. Mereka bermarkas di gedung Menteng 31. Mereka umumnya pengikut Tan Malaka yang sesudah kemerdekaan membentuk partai Murba (rakyat jelata). Tokoh-tokohnya adalah Adam Malik, Chaerul Saleh, dan Wikana, di antara nama-nama, SK Trimurti menjadi sosok perempuan yang tidak kalah penting mewakili golongan perempuan.

Lain halnya golongan sosialis di bawah Syahrir sejak semula memusuhi Jepang karena alasan ideologis. Golongan sosialis (kanan) adalah pendukung demokrasi parlementer model Eropa Barat. Ini berbeda dengan Jepang yang menganut paham fasisme. Golongan komunis di bawah pimpinan Amir Syarifudin (seorang sosialis kiri) sangat bertentangan dengan Jepang. Amir Syarifudin sebagai bekas tokoh organisasi Gerakan Rakyat Indonesia yang condong ke paham kiri (komunis), bergerak lebih radikal. Golongan ini membangun jaringan di kalangan pemuda. Akan tetapi, gerakan golongan komunis ini segera diketahui oleh pemerintah pendudukan Jepang. Karena kegiatannya menggerakkan perlawanan rakyat, Amir Syarifudin ditangkap pemerintah pendudukan Jepang.

Pemerintah Jepang menindak tegas setiap gerakan yang mencoba menentangnya. Penindasan dan pemerasan sumber daya alam serta manusia benar-benar dimanfaatkan oleh Jepang. Hal itu menimbulkan penderitaan rakyat baik secara lahir maupun batin. Menghadapi keadaan ini, para nasionalis mencari jalan keluar untuk mengatasinya. Karena gerakan yang non-kooperatif tidak mendapat tempat, para pejuang melakukan gerakan kooperatif yang dapat diterima oleh Jepang. Tujuan utama perjuangan mereka adalah mencapai Indonesia merdeka.

Kerja sama kooperatif dengan pemerintah Jepang hanyalah suatu siasat atau taktik belaka. Dengan cara ini, para pejuang dapat duduk dalam lembaga-lembaga pemerintah. Dengan demikian, mereka dapat memperjuangkan atau membela nasib rakyat. Di samping itu, para pejuang dapat memanfaatkan organisasi dan lembaga-lembaga yang didirikan pemerintah Jepang untuk perjuangan kaum nasionalis. Lembaga-lembaga resmi ini, beberapa di antaranya mempunyai peranan yang positif. Lembaga-lembaga resmi itu menjadi jalan dan sarana untuk menyalurkan ide-ide nasional. Lembaga-lembaga resmi itu telah ada sejak awal pendudukan, di antaranya adalah Gerakan Tiga A, Putera, Jawa Hokokai, MIAI, Peta, Heiho, Seinendan, Keibodan, Fujinkai, dan Barisan Pelopor.

Pada zaman perjuangan kemerdekaan, tidak sedikit pemimpin pergerakan nasional yang menolak bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang. Mereka melakukan kegiatan perjuangan secara rahasia di luar kerangka pemerintahan. Gerakan mereka tidak menjurus ke perlawanan bersenjata. Akan tetapi, gerakan mereka lebih bertujuan untuk menggalang solidaritas dan memperteguh cita-cita perjuangan. Para tokoh pemimpin pergerakan kebangsaan yang berjuang melalui gerakan non-koperasi antara lain Sutan Syahrir, Achmad Subarjo, Adam Malik, Sukarni, Wikana, Chaerul Saleh, dan Amir Syarifudin. Sutan Syarir termasuk golongan sosialis kanan yang sejak awal menentang imperialisme Jepang. Amir Syarifuddin adalah tokoh sosialis kiri yang juga memusuhi Jepang karena alasan ideologi. Sementara itu, Adam Malik, Chaerul Saleh, Wikana, dan Achmad Subarjo berasal dari Pemuda Menteng. Disebut “Pemuda Menteng” karena mereka bermarkas di Jalan Menteng No. 31, Jakarta. Mereka semua memilih bentuk perlawanan non-koperasi karena yakin bahwa kemerdekaan Indonesia hanya bisa diraih melalui bentuk perlawanan ini (G. Moedjanto, M.A., Indonesia Abad Ke-20, Jilid 1, 1998: 76-80).

**Simpulan**

Selama masa pendudukan Jepang sampai dengan Indonesia merdeka, peran politik perempuan Indonesia secara umum adalah sebagai kelanjutan dari aktivitas politik kaum perempuan yang sudah ada masa-masa akhir kekuasaan Belanda. Meski, dalam prakteknya sedikit mengalami penuruan aktivitas akibat pemberlakukan sistim kontrol kekuasaan yang diterapkan pemerintah pendudukan militer Jepang. Aktivitas mereka dimulai dari keterlibatan dalam program aksi propaganda 3A sampai dengan dengan keterlibatan langsung dalam organisasi wanita seperti Fujinkai. Kalaupun, pada kenyataannya keberadaan organisasi Fujinkai tidak lain sebagai wadah para perempuan yang sebelumnya telah mendapat kedudukan dan status sosial di masyarakat. Seperti disebutkan di awal bahwa mereka yang aktif terdiri dari para istri pejabat dan penguasa daerah setempat dan sekaligus menjadi pimpinan formal dan non-formal di tengah masyarakat.

Secara khusus peran organisasi wanita sepanjang masa pendudukan Jepang sejauh kemampuan mereka untuk memajukan dunia pengajaran dan pendidikan serta pemberdayaan kesejahtreraan sosial kaum perempuan dalam membantu jalannya pemerintahan militer Jepang. Hal ini dapat diketahui dari berbagai sorotan dan deskripsi informasi kegiatan di kalangan ibu-ibu dan kaum putri yang dikemas dalam berbagai berita surat kabar saat itu. Mulai dari acara-acara peresmian, pelatihan dan kursus-kursus wanita yang banyak diliput media.

**Daftar Pustaka**

Anderson, Benedict R.O.G., 1984. *Revolusi Pemoeda: Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945,* Jakarta: Sinar Harapan

Benda, Harry J., 1958. *The Crescent and the Rising Sun: Indonesia Islam Under the Japanese Occupation, 1942 – 1945, (Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Indonesia di Bawah Pendudukan Jepang, 1942-1945*, The Hague: W. van Hoeve

Benda, 1956. “The Beginning of Japanese Occupation of Java”, *Journal of Asian Studies, Vol. 15 No. 4, Agustus 1956*

Benda et. al. 1965. *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documenters*, New York: Yale University Press

Gunseikanbu, 1986),. *Orang Indonesia yang Terkemuka di Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Hardi, Lasmidjah, 1982. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi*, Jakarta: Sinar Harapan

Herkusumo, Arniati, 1982. *Chou Shangi In*, Jakarta: Rosda Jaya Putra

Idrus, 1966. “Two Stories of Japanese Fujinkai and och..och..och..”, (translated by Mrs. S.U. Nababan) dalam *Indonesia*, Journal Modern Indonesia Project, New York: Cornell University

Idrus, Ani, 1980. *Wanita Dulu, Sekarang dan Esok*, Jakarta: Medan Waspada

Kanahele, George Stanford, (1967) *The Japanese Occupation of Indonesia, Prelude to Independence*, New York: Cornel University Press

Kosasih, A. 2003. “Kepustakaan Periode Pendudukan Jepang (sebuah tinjauan bibliografi masa pendudukan Jepang), dalam *Bulletin Historia* No.2 Vol.VI Edisi Juli 2003

\_\_\_\_\_\_\_\_ (2005). “Organisasi Wanita dalam Sorotan Surat Kabar Jakarta pada masa Pendudukan Jepang,” *Majalah Ilmiah FAKTOR edisi Mei 2005* / hlm.27

KOWANI, 1978. *Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Lubis, Rita, 1998. “Jakarta Tokubetsu Shi Fujinkai (Perkumpulan Wanita Cabang Jakarta) 1943 – 1945” *SEKRIPSI Sarjana*, Jakarta: FSUI

Malik, Adam 1975. *Riwayat dan Perjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945*, Jakarta: Penerbit Widjaja

Mitsuo, Nakamura, 1970. “General Imamura and the Early Period of Japanese Occupation”, *Indonesia,* No. 10, 1970

Notosusanto, Nugroho, 1979. *Tentara PETA pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta: Gramedia

Pakpahan, G., 1979. *1261 Hari di Bawah Sinar Matahari Terbit, 6 Maret 2602 – 17 Agustus 2605,* Indonesia Merdeka dalam Kandungan Ibu Sejarah, Cet. Ke-II, Jakarta: CV Marintan Djaya

Penerbit Sejarah Lisan No. 4, 1988. *Di Bawah Pendudukan Jepang: Karangan Empat Puluh Dua Orang yang Mengalaminya*, Jakarta: ANRI

Prawiroadojo, Soehoed, 1953. *Perlawanan Bersenjata Terhadap Fasisme Djepang*, Djakarta: Merdeka Press

Reid, Anthony, 1975. “The Japanese Occupation and Rival Indonesia Elites”, *Journal of Asian Studies, XXXV, No. 1, November 1975*

Sihombing, O.D.P., *Pemuda Indonesia Menentang Fasisme Jepang*, Djakarta: Sinar Djaya

Soebarjo, Ahmad, 1972). *Lahirnya Republik Indonesia: Suatu Tinjauan dan Kisah Pengalaman*, Jakarta: PT. Kinta

Bunkyokoku, “Didikan Boedi Pekerti”, Djakarta: Gunseikanbu Kanrikojo, (2605 : 23)

*Djawa Shinbun Kai*, “Iboe dan Anak Penghidoepan wanita di Zaman Baroe” oleh *Djawa Shinbunkai Tjet. 1, Djakarta (2605)*

*Sedyawati, Edi*. 1991. *“Peran Wanita dan Pria dalam Beberapa Cerita Daerah” Prisma No. 7 Tahun XX, Juli 1991 hal. 24 – 35*

Irvanus, Edwin, 2002. “Dilema Peran Ganda Perempuan Bekerja” *Sinar Harapan, Sabtu 2 November 2002*

Julia I. Surya Kusuma. 1991. “Konstruksi Sosial Kekuasaan: Sebuah Pengantar Teoritis” *Prisma No. 7 Tahun XX, Juli 1991 hal. 3 – 14*

*---------------------------,* 1991.“Seksualitas dalam Pengaturan Negara” *Prisma No. 7 Tahun XX, Juli 1991**hal. 70 – 83*

*Saiko Shikikan,* “Keterangan Saiko Shikikan tentang hal Toeroet Mengambil Bahagian dalam Pemerintahan Negeri dan Penjelasan Pemerintah (Djakarta), Djawa – Gunseikanbu (2603)

**Surat Kabar**

1. Almanak Asia Raya, tahun 2602 – 2605
2. Asia Raya, tahun 2602 – 2605
3. Kan – po (Berita Pemerintahan), tahun 2602 – 2605
4. Pandji Poestaka, tahun 2602 – 2605
5. Pembangoenan, tahun 2602 – 2605
6. Suara Asia, tahun 2602 – 2605,

**Internet**

* 1. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0211/02/opi02.html>
  2. [http://www.mail-archipe.com/rezim70@yahoogroups.com/ msg01095.html](http://www.mail-archipe.com/rezim70@yahoogroups.com/%20msg01095.html) “Undangan Rapat Advokasi Jugunianfu” Jakarta, 17 Januari 2005
  3. Dian Suprapto, “Sejarah Hari Ibu” dalam Majalah BSI Kharisma (<http://www.kharisma.de/berita/berita_2_3.html>)
  4. Rahmawati Efendi Rustam, “Mengusung Peran Wanita Dalam Politik” (<http://fatayat.numesir.org/fatayat/edisi3/opini.htm>)
  5. Najlah Baqiyah, “Suara hati Seorang Perempuan: Penindasan Politik Perempuan” Selasa, 5 Maret 2003 (<http://najlah.blogspot.com/2003_03_01_najlah_archive.html>)